

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun pembahasan peneliti serta acuan yang digunakan untuk membantu melihat persamaan dan perbedaan terhadap permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yang dapat diuraikan sebagai berikut.

**Pertama**, pada penelitian Hendra Ari Purnomo Aji, dengan judul penelitian “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus : Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo )” Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif yang memfokuskan penerapan teknologi pada bidang pelayanan perizinan usaha yaitu *Online Single Submission* (OSS) pada jenis izin usaha mikro kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Situbondo. Persamaan yang ada didalam penelitian ini adalah implementasi pelayanan pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan perbedaannya adalah, objek yang diteliti yaitu perizinan usaha.<sup>9</sup>

**Kedua**, pada penelitian Soufika Rachmi, dengan penelitian berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan *Online* di Dinas Penanaman Modal dan

---

<sup>9</sup> Hendra Ari Purnomo Aji, 2019. *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Studi Kasus : Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo)*. Situbondo.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli kabupaten” Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif membahas perizinan *online* merupakan implementasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Persamaan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan implementasi perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perbedaan penelitian ini adalah program kebijakan yaitu OSS.<sup>10</sup>

**Ketiga**, pada penelitian Hisyam Afif Al Fawwaz, dengan penelitian berjudul “Implementasi Sistem *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Ngawi (Persepektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Hukum Islam)” Penelitian ini membahas berkembangnya teknologi diikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sebagai dasar membangun hubungan antar negara dan masyarakat. Persamaan yang ada didalam penelitian ini adalah pengimplementasian sistem *Online Single Submission* sebagai pelayan perizinan mendirikan usaha secara elektronik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soufika Rachmi. 2019. *Implementasi Pelayanan Perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang*. Deli Serdang.

<sup>11</sup> Hisyam Afif Al Fawwaz. 2019. *Implementasi Sistem Online Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelyananan Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 dan Hukum Islam)*. Ngawi.

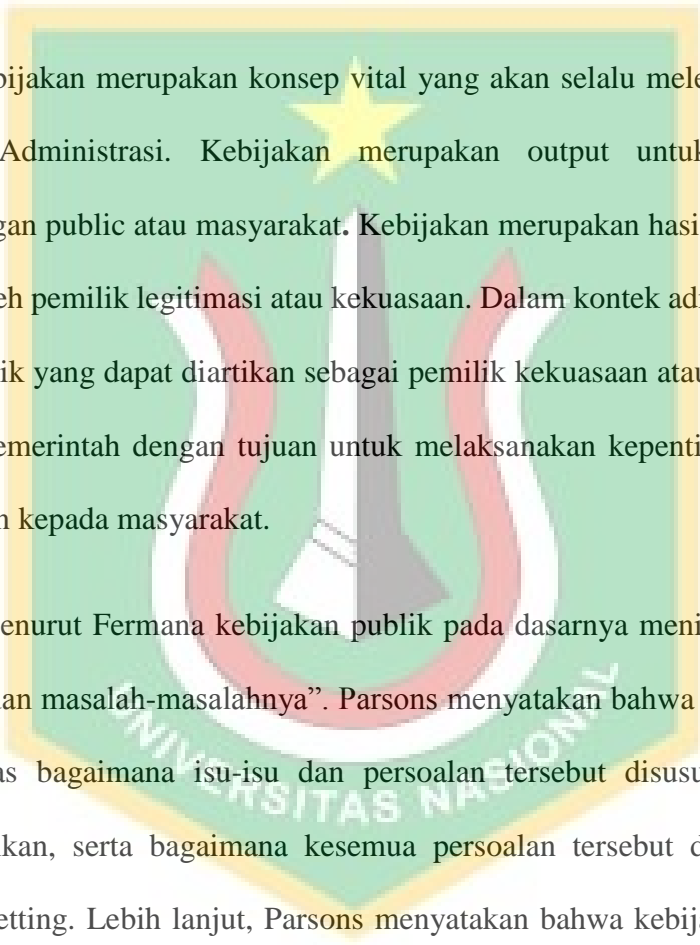
**Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Hendra Ari Purnomo Aji / 2019	Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Studi Kasus : Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo )	Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif yang memfokuskan penerapan teknologi pada bidang pelayanan perizinan usaha yaitu <i>Online Single Submission</i> (OSS) pada jenis izin usaha mikro kecil diDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Situbondo
2	Soufika Rachmi / 2019	Implementasi Pelayanan Perizinan <i>Online</i> di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang	Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif membahas perizinan <i>online</i> merupakan implementasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Seradang
3.	Hisyam Afif Al Fawwaz / 2019	Implementasi Sistem <i>Online Single Submission</i> Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Ngawi (Persepektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Hukum Islam)	Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif membahas mengenai pengimpelementasian sistem <i>Online Single Submission</i> terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan izin usaha secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi dalam persepektif Hukum Islam.

## 2.2 Kerangka Konsep Teori

Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep implementasi, kebijakan publik, dan sistem OSS yang memiliki relevansi terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

### 2.2.1 Teori Kebijakan Publik



Kebijakan merupakan konsep vital yang akan selalu melekat pada sebuah konsep Administrasi. Kebijakan merupakan output untuk melaksanakan kepentingan public atau masyarakat. Kebijakan merupakan hasil keputusan yang dibuat oleh pemilik legitimasi atau kekuasaan. Dalam konteks administrasi negara atau publik yang dapat diartikan sebagai pemilik kekuasaan atau legitimasi yaitu adalah pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan kepentingan dan proses pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Fermana kebijakan publik pada dasarnya menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Parsons menyatakan bahwa kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (constructed), didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda setting. Lebih lanjut, Parsons menyatakan bahwa kebijakan publik juga merupakan studi bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah atau kebijakan publik adalah tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”. Eston dalam Nugroho mendefinisikan

kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah. Cochran dalam Fermana (2009:35) menyatakan secara spesifik kebijakan publik adalah keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala bentuk aktivitas dan keputusan pemerintah yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada lingkup dan kepentingan publik.<sup>12</sup>

### 2.2.1.1 Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya<sup>13</sup>

- a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi, Kewenangan merupakan otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur

---

<sup>12</sup> Fermana, S. 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

<sup>13</sup> Wahyudi, A. (2016). *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 2(2), 101-105.  
<http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>

birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.<sup>14</sup>

- b. Komunikasi, Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku.<sup>15</sup> Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan . Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

---

<sup>14</sup> Afandi, M. I., & Warjio. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 92-113.

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>

<sup>15</sup> Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). *Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai*. Journal of Management, 2(2). <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/568/553>

- c. Sumberdaya, Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya.
- d. Disposisi atau sikap dari pelaksana Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksana. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan



individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, menghimpun beberapa teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, diantaranya:

- a. Teori Merilee S. Grindle Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi kebijakan (content of policy); dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah penempatan lokasi program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaannya secara detail; dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
- b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Teori ini menyebut ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/ Undang-Undang (ability of statute to structure implementation), dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).
- c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Teori Meter dan Horn menyatakan paling tidak dijumpai lima variabel yang mempengaruhi kinerja

---

<sup>16</sup> Afandi, M. I., & Warjio . *Op.cit.* Hal 92-113



pelaksanaan kebijakan publik, yakni: standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. .<sup>17</sup>

### 2.2.1.2 Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

Dikutip dari Nugroho, membagi bentuk kebijakan publik menjadi empat, meliputi.<sup>18</sup>

1. Kebijakan Formal, yaitu keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan formal dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
  - a. Perundang-undangan, yaitu kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan nasional, baik berkenaan dengan negara maupun masyarakat atau rakyat.
  - b. Hukum, yaitu kebijakan yang bersifat “membatasi” dan “melarang”. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik.
  - c. Regulasi, yaitu berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan negara oleh pemerintah – sebagai wakil lembaga negara – kepada pihak non- pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba.
2. Kebijakan dalam bentuk Konvensi, yaitu kebijakan yang didasari oleh adanya kesepakatan umum pejabat publik atau kebiasaan atau konvensi.

---

<sup>17</sup> Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>18</sup> Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy (edisi keenam)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal.125

Kebijakan ini ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik, upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, atau tertulis tapi tidak diformalkan.

3. Kebijakan dalam bentuk Pernyataan Pejabat Publik, yaitu yang berdasarkan atas pernyataan dan ucapan yang dilakukan oleh pejabat publik. Sehingga, pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpinnya dan pejabat publik harus bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan dari lembaga publik yang diwakilinya.
4. Kebijakan dalam Perilaku Pejabat Publik, yaitu mencakup gaya kepemimpinan dan kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin. Thomas R. Dye mengutip dari Syafie mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan sesuatu itu. Sehingga, dalam artian, perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin dapat dikatakan sebagai kebijakan yang dapat ditiru oleh publik misalnya adalah blusukan dan ketegasan pemimpin.<sup>19</sup>

### **2.2.1.3 Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik**


Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Good Governance, menurut pemahaman penulis maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/ dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

---

<sup>19</sup> Syafie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal 105

- a) Konsistensi Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.
- b) Transparansi Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti.
- c) Akuntabilitas Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- d) Keadilan Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
- e) Partisipatif Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang pencetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan

kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan sebaiknya bersifat partisipatif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat

- 
- f) Efektivitas Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.
- g) Efisiensi Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya (Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/1661/>

## 2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit atau mikro,<sup>21</sup>

Charles O. Jones mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu organization, interpretation, and application.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan - tindakan dalam keputusan – keputusan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – tindakan operasioanal dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Tachjan.2006. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: TrunRTH

<sup>22</sup> Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita. Hal 146-147

Sedangkan menurut Mustopa dijaja implementasi kebijakan public adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tangkilisan implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar diperaturan dan konsekuensi dari kebijakan masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan..<sup>23</sup>

Menurut Mulyadi implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Sehingga perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. Abidin yang dikutip oleh Mulyadi mengelompokan pendekatan dalam implementasi kebijakan publik kedalam empat pendekatan.

1. Pendekatan Struktural, yaitu melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan:

---

<sup>23</sup> Asma husna. 2020. *IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAMRANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA*. Medan. Hal 25

- a. Planning of change yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi;
  - b. Planning for change yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.
2. Pendekatan Prosedural/manajerial, yaitu melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.
  3. Pendekatan kewajiban/behavior, yaitu berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikan.
  4. Pendekatan politik, yaitu keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

#### **2.2.2.1 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Model Implementasi kebijakan telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang begitu peduli tentang kebijakan publik di antaranya George Edward III, Charles O Jones, Van Meter dan Van Horn, Daniel dan Paul A. Sabatier dan masih banyak lagi. Akan tetapi pada kesempatan ini dengan tidak menyepelekan pendapat dari



ahli lainnya untuk lebih jauh dan mendalam mengkaji tentang implementasi kebijakan system OSS.

### 1) Model Charles O. Jones

Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting.

1. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
2. Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

Bertumpu pada apa yang dikemukakan Charles O. Jones tersebut, maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, dimana

implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari organisasi, interpretasi dan aplikasi.<sup>24</sup>

## 2) Model Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

---

<sup>24</sup> Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, Femmy Tasik. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan. Vol 3

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standard dan sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan, dapat dikatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya dari ukuran dan tujuan yang bersifat nyata yang berada pada level pelaksana kebijakan. Agustino mengatakan, ketika suatu ukuran kebijakan terlalu ideal, maka kebijakan tersebut akan dapat sulit dijalankan.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

### 3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. 2 (dua) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

### 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Disamping itu, koordinasi merupakan

mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

#### 5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

#### 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.<sup>25</sup>

#### 3) Model Model George C. Edward III

Model implementasi dari Edward III ini ada beberapa variabel di dalam pengimplementasian kebijakan publik yang harus di pertimbangkan, yaitu beberapa faktor internal di dalam organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu sama lain. Model

---

<sup>25</sup> Kertya Witaradya - Governance Consultant. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*.  
<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/> [dikunjungi 27 Maret 2022].



implementasi kebijakan ini bersifat top to down yang dikembangkan oleh Edward III dalam Agustino.

Dalam pendekatan model ini terdapat empat variabel yang menentukan hasil dari implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi menurut George C. Edward III dalam Agustino sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personaliyang tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
2. Sumber daya. Menurut Edward III dalam Indiahono, sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Lebih lanjut dijelaskan menurut George C. Edward III dalam Agustino, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena sumber daya yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah sumber daya

saja tidaklah cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan sumber daya dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya finansial menurut George C. Edward III dalam Indiahono adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab, tanpa kehandalan implementor, kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi. Menurut Edward III dalam Indiahono, disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan
4. Struktur birokrasi. Menurut Edward III dalam Indiahono struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) dan mudah dipahami oleh yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh

George C. Edward III dalam Agustino, SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.<sup>26</sup>

#### **4) Model Merilee S. Grindle**

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle adalah keberhasilan implementasi publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan itu ada dua hal yaitu prosesnya kebijakan, apakah pelaksanaan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

Tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakanyang terdiri atas isi kebijakan

dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan meliputi kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Untuk isi implementasi meliputi kekuasaan yakni kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik dari lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan dimana implementasi kebijakan dijalankan, sejauh mana tingkat kepatuhan dan 29 respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.<sup>27</sup>

Berdasarkan model implementasi kebijakan publik para ahli diatas peneliti akan menggunakan model yang lebih, maka dapat disimpulkan Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan serta

---

27

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dengan ini penelitian menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn.

### **2.2.3 Sistem *Online Single Submission* (OSS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pelaku usaha atau pemohon perizinan berusaha melalui OSS meliputi antara lain:

- 1) Pelaku Usaha Perseorangan
- 2) Pelaku Usaha Non Perseorangan, antara lain: Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan umum daerah, Badan hukum lainn yayang dimiliki oleh negara, Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga penyiaran, Badan usaha yang didirikan oleh yayasan, Koperasi, Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/ CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

a) Berikut merupakan beberapa pelaku usaha yang wajib menggunakan OSS

(*Online Single Submission*):

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan.
2. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar.
3. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS (*online Single Submission*).
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

b) Berikut prosedural untuk menggunakan *Online Single Submission* (OSS):

1. Membuat user-ID.
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID.
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.
5. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bpk.go.id. (2018). *PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [JDIH BPK RI]*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018> [dikunjungi 27 Maret 2022].

Sistem OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik. Jenis perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dikelompokkan menjadi dua yaitu izin usaha dan izin komersial atau operasional. 3 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Prinsip Dasar Pelaksanaan Sistem OSS:

a. Terstandarisasi

Sistem OSS menstandarkan sistem sistem perizinan yang tersebar di K/L/D. Standarisasi ini meliputi standarisasi bisnis proses dan format izin yang ada.

b. Terintegrasi

Sistem OSS terintegrasi dengan sistem AHU *Online*, Sistem DUKCAPIL, Sistem DJP *Online*, Sistem SPIPISE serta Sistem Aplikasi Perizinan Pemda.

c. Kemudahan akses

Sistem OSS merupakan sistem layanan perizinan secara *online* berbasis internet /web melalui : <http://oss.go.id>.

d. Self Assessment

Sistem OSS memberikan kepercayaan (trust) kepada pelaku usaha dengan menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional yang belum berlaku efektif. Proses penyelesaian komitmen izin tersebut dilakukan oleh pelaku



usaha di luar Sistem OSS pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai kewenangannya.<sup>29</sup>

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diketahui bahwa *Online Single Submission* (OSS) adalah sebuah sistem yang dapat dipakai untuk melakukan segala macam jenis proses registrasi dan pengurusan legalitas bisnis serta pengurusan perizinan yang lain, yang tertera pada layanan legalitas usaha. Yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan berbasis elektronik, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder, dapat memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time, dan memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas.

Untuk mengukur implementasi kebijakan OSS pada DPMPTSP kota depok, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menggunakan enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan sosial ekonomi dan politik, dengan tujuan untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan ini. Digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Buku Petunjuk Singkat *Online Single Submission* (OSS) DPTMPTSP Kota Medan. 2019

## Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan elektronik.



Indikator Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975).

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik



Tujuan dari kebijakan ini adalah :

1. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan berbasis elektronik
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder
3. Dapat memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu